

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil alaamiin, kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024. Penyusunan dokumen Renja ini merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sebagai penjabaran RPJMD dalam setiap Tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun yang merupakan salah satu landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam program dan kegiatan yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 masih belum optimal, Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bogor, Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor



GANJAR GUNAWAN, A.P
NIP. 19750715 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	16
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL.....	38
BAB V PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun berdasarkan Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Bogor demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kota Bogor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173).

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja Perubahan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5), RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi data Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bogor;
16. Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 merupakan arah dan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan bagi Sekretariat dan Bidang pada Tahun sebelumnya, dan Perencanaan Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

- Untuk menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif dan Lokasi Kegiatan.
- Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja Perubahan SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kerja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Kondisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Alokasi dana anggaran untuk kegiatan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sesuai dengan DPA yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 Semester I sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.181.600	7.524.800	5.25%
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.555.261.098	4.723.679.018	55.21%
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.335.500	2.594.000	15.87%
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.760.400	29.687.000	55.22%
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.882.100	207.556.700	98.89%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	63.600.000	84.8%
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.623.800	75.045.000	75.32%
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.241.200	234.850.067	72.88%
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	399.902.800	157.654.100	39.42%
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.999.900	123.855.103	45.03%
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.421.338.300	520.832.966	36.64%
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.155.800	49.489.800	50.93%
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	230.348.300	33.722.000	14.63%
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	87.002.000	46.270.000	53.18%
15.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.000	0	0%
16.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	9.770.000	0	0%
17.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	82.880.000	79.476.000	95.89%
18.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1.709.477.100	1.640.557.500	95.96%

19.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	9.999.900	0	0%
20.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100.000.000	0	0%
21.	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	200.125.000	192.319.710	96.09%
22.	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	160.000.000	153.673.451	96.04%
23.	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	227.485.900	195.520.798	85.94%
24.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	36.673.000	32.446.700	88.47%
Jumlah		14.532.213.698	8.581.502.213	59%

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2.	Rasio Bayi berakte Kelahiran	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4.	Ketersediaan database Penduduk skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75	98	99,34	98	98,50	99	99
7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75	95	82	85	95	95	95
8.	Kepemilikan KTP	93,30	98	99,34	98	98,50	99	99
9.	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	94,07	95	96	97	98	100	100
10.	Cakupan Pasangan Non Muslim Berakte Kawin	51	31	53,82	35	40	45	45

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencja Perangkat Daerah dan Pencapaian Resntra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Disdukcapi Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian	
				Target Renja Disdukcapi Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Disdukcapi Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (7/6)	8	9 = (5+7+9)	10 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan SKPD : Renja, Renstra, DPA, DPPD, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, SOP, Buku Survei IKM	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan SDN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan pakai habis rumah tangga dan peralatan taman	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan operasional perangkat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan barang (peralatan dan mesin)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga informasi, keamanan, keberihan, supir yang dibayarkan, pakaian dinas, pakaian kerja, belanja premi BPJS Kesehatan dan belanja sepatu	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan bahan bakar, pelumas, dan pemeliharaan pajak kendaraan, alat angkut, kendaraan bermotor dan penumpang	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dan DED pembangunan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55

atau Bangunan lainnya	(genset, kendaraan dinas, sarana kantor dan server)								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumah penduduk non permanen yang rentan administrasi kependudukan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	25
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kepemilikan KTP)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan Pendaftaran Penduduk (pindah datang), WNI, WNA dan RW percontoha+n	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Fasilitasi pendaftaran penduduk	Persentase terlayannya pendaftaran penduduk	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya sosialisasi workshop perkawinan dan perceraian	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya sosialisasi dan workshop pelayanan pencatatan sipil, dan tersedianya penjilidan buku register akta	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase terlayannya administasi pencatatan sipil	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi adminduk tingkat kecamatan dans kelurahan	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100	2 aplikasi	2 aplikasi	100

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan informasi kependudukan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	25
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Persentase data kependudukan yang akurat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	55
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data kependudukan	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	9 bulan	25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang memiliki KK
2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP-el
3. Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk mencapai target prosentase kepemilikan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan, dan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan.

Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan aplikasi pelayanan, Pemeliharaan Jaringan online dan hardware, Pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Penataan dokumen kependudukan, Pembangunan aplikasi pelayanan, Peningkatan SDM operator, Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan, dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan.

Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan surat pindah datang, Pelayanan Kartu Keluarga, Pengelolaan informasi kependudukan, Intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dan Pemeliharaan jaringan online dan hardware.

Untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan online dan perangkat keras/hardware, Pengadaan peralatan pendukung SIAK, Peningkatan SDM operator SIAK, dan Pengelolaan Informasi kependudukan guna meningkatkan kesadaran tertib administrasi dilakukan langkah-langkah kerjasama antar SKPD dan membuat dan meningkatkan inovasi, sosialisasi yang dilakukan melalui pembuatan company profil disdukcapil agar masyarakat lebih memahami kinerja disdukcapil dan pembuatan animasi pelayanan merupakan inovasi sosialisasi dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan layanan-layanan tersebut, Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh sarana/prasarana yang cukup memadai seperti mesin anjungan nomor antrian, pojok baca, tempat duduk lansia, parkir kendaraan kaum difabel, kursi roda bagi kaum difabel, dan sarana-sarana penunjang lainnya yaitu pojok ASI, penyediaan air siap minum (dari PDAM), parkir kendaraan, arena bermain anak dan musholla.

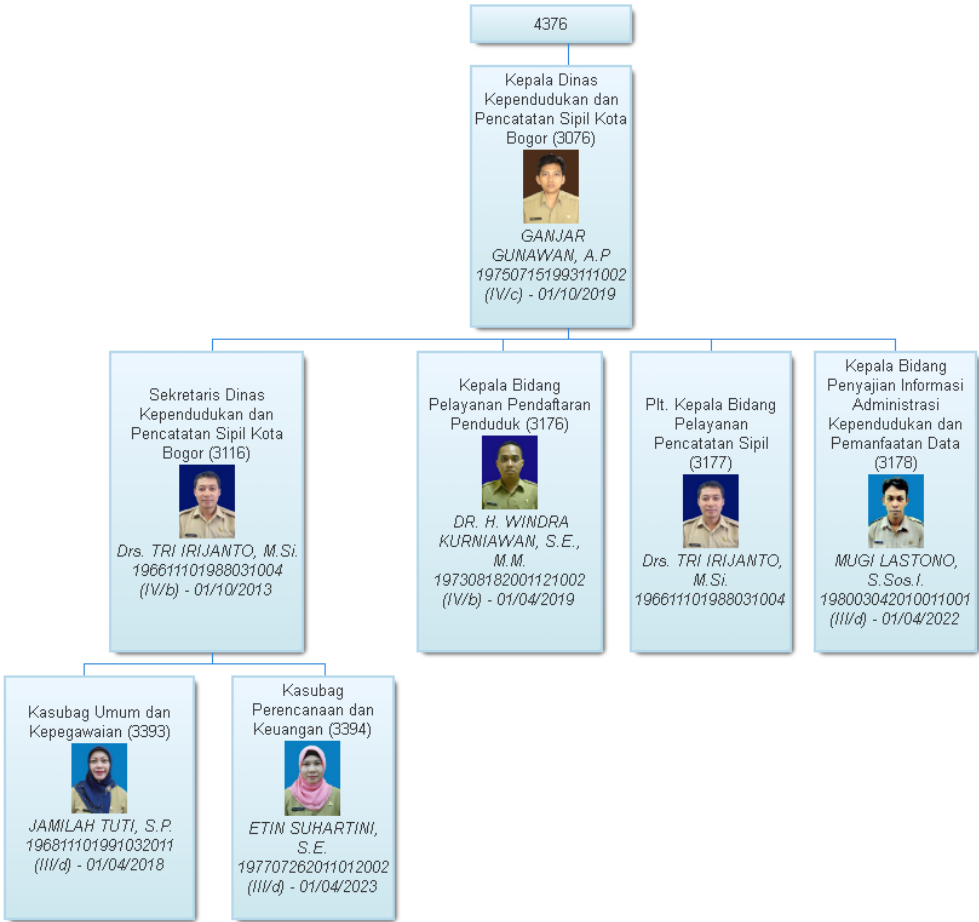
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan di dukung 50 pegawai dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status/Golongan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS-Golongan IV	4 Orang
2.	PNS-Golongan III	27 Orang
3.	PNS-Golongan II	18 Orang
4.	PNS-Golongan I	1 Orang
Jumlah		50 Orang

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2018)	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2018)	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penduduk yang ber-KTP/ Jumlah Penduduk Wajib KTP	98%		72.05%	93.30%	98%	97%	99.03%	98%	100%	100%	Adanya Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (KTP)
2.	Presentase Penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk	94%		86%	75%	95%	96%	94.07%	94.07%	100%	100%	Adanya Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (Akte)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk saat ini :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el), akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan identitas kependudukan;
2. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran, akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan identitas kependudukan;
3. Belum terdatanya anak usia 0 – 16 + (tidak ber-KTP), sehingga perlu diantisipasi dengan pembuatan Kartu Identitas Anak;
4. Masih banyak Penduduk yang meninggal dunia tapi belum ada pelaporannya;
5. Dengan adanya data terpusat di Kementerian Dalam Negeri mengakibatkan Permohonan Data harus dilakukan langsung ke Pusat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 memuat perubahan, arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, urusan pemerintahan, disertai dengan perubahan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selaras dengan penggunaan anggaran, maka perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tabel 2.5
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya Buku Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Sertifikat Hasil Audit ISO Tersusunnya Laporan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja Tersusunnya RKA dan DPA	15 buku 1 sertifikat 30 buku 10 buku	111.423.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersusunnya Buku Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Sertifikat Hasil Audit ISO Tersusunnya Laporan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja Tersusunnya RKA dan DPA	15 buku 1 sertifikat 30 buku 10 buku	143.181.600
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Bogor	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.365.772.234	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Bogor	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	9.814.443.080
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen listrik	1 Tahun	22.135.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	27.730.200
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	84.596.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	53.760.400
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	620.872.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	465.499.500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	244.950.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya amplop dinas, blanko dinas dan buku disposisi	1 Tahun	75.000.000
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	123.855.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Terfasilitasinya kunjungan tamu	1 Tahun	486.128.800
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	532.840.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Tersedianya penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	422.241.200
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 paket	4.032.803.264	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor	1 paket	1.032.240.400
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	513.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	1 Tahun	274.999.900
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, jasa tenaga keamanan , tenaga kebersihan, tenaga supir, belanja pakaian dinas, premi BPJS dan sepatu PDH	100 %	1.767.683.848	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Tersedianya jasa urusan pemerintahan untuk menunjang kalancaran kegiatan dimas	100 %	1.429.890.246
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	114.137.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur kantor	1 Tahun	166.495.800
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Bogor	Persentase pemenuhan	1 Tahun	651.474.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota	Terpeliharanya sarana dan	1 Tahun	229.138.300

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		sarana prasarana aparatur			Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Bogor	prasarana aparatur		
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	284.546.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	87.002.000
15.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Persentase pendataan penduduk non permanen dan rentan	100 %	66.150.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Terlaksananya workshop pendataan penduduk non permanen dan rentan	1 bulan	9.770.000
16.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Presentasi penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Presentasi penduduk wajib KTP yang memiliki KK Presentasi penduduk yang memiliki KIA	99,50 % 100 % 40 %	43.781.600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	75 % 12 bulan	9.770.000
17.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Persentase penduduk pindah datang WNI Persentase penduduk pindah datang WNA	12 bulan 15 RW	27.200.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	82.880.000
18.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor khusus pencetakan e-KTP dan KIA	1 paket	850.852.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	3.334.812.100
19.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan dan perceraian	100 orang	47.661.600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil di bidang perkawinan dan perceraian	100 orang	8.989.900
20.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	100 orang	97.880.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil di bidang	100 orang	98.990.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sipil					Sipil		akta kelahiran		
21.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta pencatatan sipil	1 paket	230.402.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil dan tersedianya pengadaan dokumen pencatatan sipil	1 paket	394.040.000
22.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Aplikasi	345.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Aplikasi	160.000.000
23.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan informasi administrasi kependudukan	1 tahun	100.864.800	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan	1 Tahun	227.485.900
24.	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Tersusunnya data buku agregat kependudukan	1 paket	175.000.000	Tersusunnya data buku agregat kependudukan	Kota Bogor	Terlaksananya penyusunan Data Agregat Kependudukan	1 paket	0
25.	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	Kota Bogor	Jumlah data kependudukan yang terintegrasi dala satu data pembangunan daerah	75 buku	33.600.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang prima	75 buku	36.673.000

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2020-2024 dan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Bogor

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

5.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Walikota dan wakil Walikota Bogor terpilih tahun 2019-2024 adalah serbagai berikut : “ **Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Ramah Bagi Keluarga** “, dapat dipandang pula dari ruang lingkup sebagai berikut :

- **Kota Bogor** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.
- **Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :
 1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
 2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
 3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Bogor, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada misi ke-3, yaitu “***Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang sejahtera***”, dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 adalah :

Tujuan : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga

Strategi :: Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Arah Kebijakan : Peningkatan layanan Adminsitasi Kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya. Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bogor terpilih Tahun 2019 – 2024

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga				
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera				
No.	Program	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan lunak, alat-alat cetak KTP-EL dan KIA	Belum maksimal nya alokasi anggaran Adminduk sehingga sulit untuk pemenuhan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Komitmen Aparatur untuk meningkatkan pelayanan Adminduk
		Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kurangnya frekuensi sosialisasi ke wilayah dikarenakan keterbatasan personil dan fasilitas	Pemberian kemudahan kepada masyarakat melalui pendaftaran Akta Kelahiran online dan kerjasama dengan rumah sakit dan bidan yang melayani ibu hamil saat melahirkan untuk pembuatan Akta Kelahiran dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya Akta kelahiran Anak dan Akta Kematian
		Adanya asumsi minoritas masyarakat bahwa pembuatan dokumen kependudukan lama dan mahal	Minimnya ketersediaan Alat Tulis Kantor Khusus untuk pencetakan KTP-el dan KIA	Tersedianya Alat Tulis Kantor Khusus untuk pencetakan KTP-el dan KIA dan terpenuhinya anggaran Alat Tulis Kantor Khusus untuk pencetakan KTP-el dan KIA

Sumber : Renstra Disdukcapil kota Bogor

- Maka untuk keberlangsungan organisasi maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standart pelayanan minimal (SPM)

- b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- c. Peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan aplikasi layanan kependudukan
- d. Memperkuat jaringan SIAK dengan strategi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan secara terpadu
- e. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian dari akhir tahapan pembangunan jangka menengah ketiga (2019-2024).

Arah pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan Pembangunan
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar SKPD
- c. Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- d. Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2019 - 2024 yaitu ” Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kondusifitas Daerah Serta Pengelolaan Rencana ”.

Dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga								
Misi : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pertahun					
			Jumlah Kuantitatif (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	A	A	A
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	NA	NA	NA	80,01	81	82

	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera								
Tujuan 2 : Meningkatnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga		Persentase penduduk yang memiliki legalitas administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Prosentase penduduk yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2019 - 2024

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sebagaimana disajikan dalam table 5.1.

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga				
Misi : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah		

		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana
			Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan		
		Persentase permohonan kerjasama oleh instansi/lembaga pemanfaatan data kependudukan yang dapat diimplementasikan	Mengoptimalkan pelayanan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik	1, Pengembangan data kependudukan berbasis sistem informasi terintegrasi
				2, Peningkatan kualitas database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan
				3, Pemutakhiran data kependudukan yang berkelanjutan
				4, Pengembangan inovasi pelayanan pemanfaatan penduduk
			Integrasi data kependudukan	Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan SKPD Kota Bogor dan instansi terkait

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
Tujuan 2 : Meningkatnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga		Persentase penduduk yang terlayani Administrasi kependudukan		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan Administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	1. Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan
		Prosentase Kepemilikan Akta Perkawinan non muslim		2. Pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan Gratis
		Prosentase penduduk yang wajib KTP yang memiliki e-KTP		3. Pemutakhiran data kependudukan, dimana masyarakat melaporkan setiap perubahan peristiwa kependudukan/peristiwa penting seperti lahir, mati atau pun perubahan data lainnya
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga		4. Meningkatkan perilaku aparaturnya dan penyederhanaan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan inovasi-inovasi adanya pelayanan online dan terintegrasi
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)		

Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2019 - 2024

Tabel 3.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						19.071.162.3 26							19.085.528.4 99	
2	1 2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	BB	BB Poin	3.40 Poin	13,664,136,8 98	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukca pil	3.50 Poin	13.708.600.1 99	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A Nilai	A		Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukca pil	A		DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A Nilai	A	143,181,600	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukca pil	A	262.263.800	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	8 Laporan	8 Laporan	143,181,600	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukca pil	8 Laporan	262.263.800	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	%	100%	100 %	100 %	9.814.443.08 0	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas	Reformasi Birokrasi	Disdukca pil	100 %	9.340.488.91 9	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL

												Gundil		i Pelayanan Publik					
2	1 2	1	0 2: 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	53 Orang/bulan	9.814.443.080	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN Disdukcapil	60 Orang/bulan	9.340.488.919	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100 %	100 %	100 %	1.530.360.100	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %	1.360.986.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	27.730.200	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Paket	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	53.760.400	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Paket	65.863.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	465.499.500	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Paket	356.829.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	1 Paket	1 Paket	75.000.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Paket	74.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

														Publik					
2	1 2	1	0 2: 0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	12 Laporan	12 Laporan	486.128.800	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	12 Laporan	406.009.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	NA	12 Laporan	12 Laporan	422.241.200	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	12 Laporan	828.294.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100 %	100 %	100 %	1.032.240.400	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %	1.259.587.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	2 Unit	2 Unit	-	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	2 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	NA	120 Unit	83 Unit	1.032.240.400	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	120 Unit	1.259.587.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

														Publik					
2	1 2	1	0 2: 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100 %	100%	100%	1.704.890.146	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100%	663.834.180	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	12 Laporan	12 Laporan	274.999.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	12 Laporan	275.412.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	12 Laporan	12 Laporan	1.429.890.246	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	12 Laporan	388.421.660	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	%	100 %	100%	100%	482.636.100	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100%	821.439.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	NA	23 Unit	23 Unit	166.495.800	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	23 Unit	221.440.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	0 2: 0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	229.138.300	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	1 Unit	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

													Publik						
2	12	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	10 Unit	10 Unit	87.002.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	10 Unit	349.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas anak (KIA)	%	40 %	50 %	60%	3.437.232.100	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	80 %	2.864.639.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99,34%	98 %	98,50%		Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	99 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100 %	100 %		Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan/pindah datang)	%	99,34%	98 %	98,50%	102.420.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	99 %	19.540.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	NA	1 Dokumen	2 Dokumen	9.770.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	9.770.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

													Publik						
2	12	2	02:01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	9.770.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	9.770.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	NA	2 Laporan	2 Laporan	82.880.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	2 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	%	100%	100 %	100 %	3.334.812.100	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %	2.845.099.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02:03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	NA	1 Laporan	1 Laporan	3.334.812.100	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	2.845.099.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	96,34%	97 %	98%	502.019.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	99 %	899.999.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	53,82%	35 %	40.00 %		Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	45 %		

														Publik					
2	1 2	3	0 2: 0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akte Catatan Sipil	%	96,34%	97 %	98%	107.979.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	99 %	399.999.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	0 2: 0 1	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	NA	NA	1 Dokumen	8.989.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat kota Bogor	1 Dokumen	199.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	0 2: 0 1	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	98.990.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat kota Bogor	3 Layanan	199.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	0 2: 0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100%	100 %	100 %	394.040.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %	499.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	0 2: 0 2	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	NA	1 Laporan	1 Laporan	394.040.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	499.999.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi	%	75%	81%	87,00 %	387.485.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	95 %	1.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

														Publik					
2	1 2	4	0 2: 0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	sistem informasi administrasi kependudukan yang disediakan, disajikan diolah dan dimutakhirkan secara berkala	Sistem Informa si	2	2	2	160.000.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	2	700.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	0 2: 0 1	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	NA	NA		0	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	3	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	0 2: 0 1	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	NA	NA		0	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	23	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	0 2: 0 1	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	NA	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	0 2: 0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah institusi dan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	Institusi	NA	5 Institusi	8 Institusi	227.485.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	12 Institusi	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	0 2: 0 3	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	NA	1 Laporan	1 Laporan	227.485.900	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

													Publik						
2	12	04	203	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	NA	NA	0	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	4	02:03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akuntabel	Dokumen	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	-	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	%	100%	100 %	100 %	36.673.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100 %	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	02:01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase elemen data kependudukan yang diolah	%	100%	100%	100%	-	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Disdukcapil	100%	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	02:01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36.673.000	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL										19.071.162.326								19.085.528.499	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Bogor, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada misi ke-3, yaitu “ ***Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Sejahtera*** ”, dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil, agar program kebijakan dapat berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan yang sudah baik tanpa diimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan, karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan.

Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024

KODE					URAIAN	JUMLAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 19.085.528.499
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.708.600.199
2	12	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp262.263.800
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp262.263.800
2	12	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.340.488.919
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.340.488.919
2	12	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.360.986.500
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 35.000.000
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 65.863.700
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 356.829.000
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 74.999.800
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 406.009.800
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 828.294.000
2	12	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.259.587.000
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.259.587.000
2	12	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 663.834.180
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 275.412.520
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 388.421.660
2	12	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 821.439.800
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 221.440.000
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 250.000.000
2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 349.999.800
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 2.864.639.100
2	12	02	2,01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 19.540.000
2	12	02	2,01	01	Pendataan Pendudukm Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp 9.770.000

2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Rp9.770.000
2	12	02	2,02		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 2.845.099.100
2	12	02	2,02	02	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Rp 2.845.099.100
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 899.999.400
2	12	03	2,01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 399.999.600
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp 199.999.800
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 199.999.800
2	12	03	2,02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 499.999.800
2	12	03	2,02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp 499.999.800
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 1.000.000.000
2	12	04	2,01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaata dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 700.000.000
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 300.000.000
2	12	04	2,01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 200.000.000
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Rp 200.000.000
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 300.000.000
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Rp 300.000.000
2	12	04	2,02		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 150.000.000
2	12	04	2,01	03	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	Rp 150.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen-dokumen penting seperti : Paspor, Sertifikat Tanah, SIM, persyaratan untuk masuk sekolah, melanjutkan Perguruan Tinggi dan lain – lain.

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan (alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu *up to date*, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan adanya Rencana Kerja Perubahan ini di harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta seluruh aparturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk selalu melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan.

Walikota Bogor,

Ttd.

BIMA ARYA